



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR
86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya perbaikan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Provinsi (Banprov) dan Dana Insentif Daerah (DID), maka Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Semula Rp961.739.324.853,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp323.035.757.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.284.775.081.853,00
b. Belanja:	
1. Semula	Rp983.514.549.013,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp773.035.757.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.756.550.306.013,00
c. Pembiayaan terdiri atas:	
1. Penerimaan, dengan rincian:	
a) Semula	Rp26.775.224.160,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp600.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp626.775.224.160,00
2. Pengeluaran, dengan rincian:	
a) Semula	Rp5.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp155.000.000.000,00
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:	
a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp239.685.021.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp239.685.021.000,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp722.054.303.853,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp323.035.757.000,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp1.045.090.060.853,00
c. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp0,00
(3) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bersumber dari:	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp113.410.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp113.410.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp42.306.021.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp42.306.021.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp82.969.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp82.969.000.000,00
(4) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1. Semula	Rp673.313.641.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp193.042.337.000,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan	Rp866.355.978.000,00
b. Transfer antar daerah	
1. Semula	Rp48.740.662.853,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp129.993.420.000,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp178.734.082.853,00
(5) Lain lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(6) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp737.252.151.675,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp439.536.922.998,00
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.176.789.074.673,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp59.666.379.763,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp318.702.215.002,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp378.368.594.765,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp5.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp181.096.017.575,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp14.796.619.000,00
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp195.892.636.575,00
(7) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, bersumber dari:	
a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp336.745.244.047,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp169.919.158.788,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp506.664.402.835,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp376.795.807.628,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp243.325.275.186,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp620.121.082.814,00
c. Belanja bunga	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp12.000.000.000,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
d. Belanja subsidi	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp0,00
e. Belanja hibah	
1. Semula	Rp20.631.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp14.274.989.024,00
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan	Rp34.906.089.024,00
f. Belanja Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 3.080.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp17.500.000,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp 3.097.500.000,00
(8) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, bersumber dari:	
a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp500.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp16.015.109.763,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp56.874.981.440,00
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp72.890.091.203,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1. Semula	Rp5.855.120.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp49.642.550.536,00
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan	Rp55.497.670.536,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp24.750.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp219.700.442.926,00
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah Perubahan	Rp244.450.442.926,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp416.150.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp3.614.240.100,00
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan	Rp4.030.390.100,00
f. Belanja modal aset tak berwujud	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja modal aset tak berwujud setelah Perubahan	Rp0,00
g. Belanja Modal Aset Lainnya	
1. Semula	Rp12.130.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp(11.130.000.000)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
(9) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu:	
a. Semula	Rp5.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp5.500.000.000,00
(10) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp15.845.731.075,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp15.845.731.075,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp165.250.286.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp14.796.619.000,00
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp180.046.905.500,00
(11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp26.775.224.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp600.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp626.775.224.160,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp5.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp155.000.000.000,00
(12) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp26.775.224.160,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp26.775.224.160,00

b.	Pencairan dana cadangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp600.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp600.000.000.000,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00
(13)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdiri atas:	
a.	Pembentukan dana cadangan	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
b.	Penyertaan modal daerah	
	1. Semula	Rp5.000.000.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp5.000.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp150.000.000.000,00
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp150.000.000.000,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	
	1. Semula	Rp0,00
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Rp0,00
setelah Perubahan
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
- Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Januari 2023
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010